

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan kegiatan dan analisis mengenai prosedur penyusunan anggaran dan pembayaran belanja kegiatan oleh bendahara pengeluaran pada dinas perumahan kota padang maka penulis menarik kesimpulan :

1. Prosedur penyusunan anggaran:
 - a. Organisasi dalam menyusun rencana program/kegiatan disuatu perusahaan adanya pembagian peran berdasarkan jabatannya dimana tujuannya untuk penyusunan anggaran Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan selama satu periode tertentu.
 - b. Penerbitan pedoman dimana anggaran yang dibuat akan dibuat pada tahun yang akan datang disiapkan beberapa bulan tahun anggaran selanjutnya dimulai
 - c. Usulan awalan anggran merupakan pejabat yang lebih tinggi menetapkan rencana instansi atau perusahaan sebagai dasar penyusunan anggaran.
 - d. Negoosiasi dalam persiapan anggaran dinas perhubungan mengadakan rapat dan menentukan target anggaran. Tujuannya sebagai perencanaan kerja sama dengan bidang-bidang untuk menyusun anggaran.
 - e. Tinjauan persetujuan pada tahap penentuan anggaran kepala dinas meninjau kembali persetujuan bersama.

f. Refisi anggaran adanya perubahan rincian anggaran yang telah di tetapkan

g. Anggaran kotijensi menentukan langkah selanjutnya selah selesainya tahap penentuan anggaran.

2. Prosedur pembayaran belanja:

a. UP: dimana bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP,SPM-UP,dan SP2D-UP untuk membiayai kegiatan sehari-hari pada dinas perhubungan ,namun bidang-bidang bertanggung jawab membuat spj,setiap pembayaran belanja kegiatan ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang berwenang, dan nilai nya harus sesuai dengan DPA dinas perhubungan kota padang.

b.LS: bendahara pengeluaran mengajukan pembayaran LS untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga,seperti pembayaran gaji.

3. Setiap pekerjaan pada dinas perhubungan kota padang pastinya memiliki kendala ,yang paling sering dirasakan jaringan internet untuk melakukan pembayaran transfer dan selisih angka pada menerima kwitansi disaat setiap bidang melaporkan SPJ nya.

4. Dari semua kendala yang terjadi pastinya Dinas Perhubungan memiliki solusi yaitu semestinya bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan diperlukan adanya bendahara pembantu dalam menjalankan tugasnya. Bendahara pengeluaran pembantu diberikan pembekalan terhadap penggunaan teknologi masa sekarang.

5.2 Saran

Adapun yang dapat disarankan oleh penulis adalah :

1. Sebaiknya dinas perhubungan kota padang diberikan pembekalan penggunaan SIPKD dan SIPD kepada seluruh pegawai keuangan untuk menunjang kegiatan dalam mengelola keuangan
2. Dalam perasipan dokumen berupa SPJ seharusnya dikelola dan dijaga sebaik mungkin. Karena tim dari BPKAD selalu melakukan pengecekan.
3. Dalam membuat pembukuan bendaharapengeluaran bekerja secara berhati-hati agar menghindari selisih angka dikarenakan berdampak pada anggaran yang diterima.
4. Dinas Perhubungan kota padang diharapkan lebih maju dan bekerja sama dalam melaksanakan program peningkatan pelayanan khususnya keuangan dalam lingkungan kerja.

